



Judul : Komisi XI: Friderica Cs jadi market guardian
Tanggal : Minggu, 15 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

5 Komisioner OJK Terpilih Komisi XI: Friderica Cs Jadi Market Guardian

SENAYAN berharap penetapan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031 jadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan. Hal ini guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah meningkatnya kompleksitas risiko global.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, tanggung jawab Dewan Komisioner OJK ke depan semakin berat. Karena skala industri jasa keuangan nasional yang terus membesar dan semakin meningkatnya eksposur terhadap risiko global. Termasuk volatilitas atau fluktuasi pasar keuangan, perkembangan *financial technology (fintech)*, dan perlindungan konsumen yang semakin kompleks.

“Industri jasa keuangan kita sekarang bukan kecil. Skala pengawasannya besar dan risikonya juga makin kompleks,” ujar Misbakhun usai

Rapat Paripurna DPR tentang pengesahan 5 orang untuk mengisi kekosongan pemimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada, Kamis (12/3/2026).

Lima pimpinan OJK itu adalah, Ketua: Friderica Widayari Dewi, Wakil Ketua: Hernawan Bakti Sasongko, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD): Adi Budiarmo, dan KE Edukasi & Perlindungan Konsumen: Dicky Kartikoyono

Misbakhun berharap, OJK hadir sebagai regulator yang tegas, tapi juga adaptif terhadap

perubahan. Selain itu, pertumbuhan sektor keuangan digital sangat cepat yang perlu diawasi. Di antaranya, pinjaman daring, aset kripto, dan inovasi teknologi keuangan lainnya yang membutuhkan keseimbangan antara inovasi dan manajemen risiko.

“OJK tidak boleh hanya menjadi rule maker atau pembuat aturan, tetapi harus menjadi market guardian atau penjaga pasar,” tegas politikus Golkar ini. Dengan itu, inovasi harus dijaga, tetapi disiplin risiko tidak boleh longgar agar masyarakat tidak dirugikan.

Misbakhun menekankan, aspek perlindungan konsumen harus menjadi prioritas kepemimpinan baru OJK, terutama di tengah masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait praktik jasa keuangan. Mulai dari pinjaman online ilegal hingga produk investasi berisiko tinggi yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

Apalagi, lanjutnya, tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih berada di kisaran 50 persen. Hal ini menunjukkan setengah dari masyarakat Indonesia masih rentan terhadap risiko produk keuangan yang tidak dipahami secara utuh. Karena itu, peran edukasi dan pengawasan OJK menjadi sangat strategis.

Dia menambahkan, pentingnya menjaga kepercayaan investor terhadap sistem keuangan Indonesia. Sebab persepsi terhadap kualitas regulator sangat memengaruhi aliran investasi dan stabilitas pasar keuangan nasional. Terlebih, pasar keuangan itu sangat sensitif terhadap kepercayaan. ■ TIF